

DETERMINASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dennyca Hendriyanto Nugroho¹, Febra Robiyanto²

^{1,2}Universitas Muria Kudus

Email : dennyca.hendriyanto@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel pemoderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner dibagikan kepada 64 pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan, Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern memoderasi hubungan antara Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sedangkan Sistem Pengendalian Intern tidak mampu memoderasi Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern.

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Regional Financial Accounting System, Financial Management Transparency, and Use of Information Technology on the Quality of Regional Financial Statements with the Internal Control System as a coding variable. The data used in this study are primary data. The data collection method uses questionnaires that are distributed to respondents. The questionnaire was distributed to 64 employees of the Kudus Regency Regional Revenue, Finance and Assets Management Agency. The data analysis method used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study show that the influence of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the quality of Financial Statements, Financial Management Transparency does not have a positive and significant effect on the quality of Financial Statements. Financial Statements, and the Use of Information Technology do not have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements. The results of this study also show that the Internal Control System moderates the relationship between the Influence of the Regional Financial Accounting System, while the Internal Control System is unable to moderate the Influence of Financial Management Transparency, and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Statements.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Financial Management Transparency, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Statements and Internal Control System.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik mengemas dan mengarahkan pemahaman pembaca pada realitas dan fenomena akuntansi sektor publik, baik konsep maupun tataran praktik. Organisasi sektor publik dari hari ke hari senantiasa dituntut untuk bekerja secara akuntabel dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam segala hal, baik SDM, pengelolaan, maupun yang terpenting manajemen keuangan. Ini sesuai tujuan keberadaan dan pengembangan akuntansi sektor publik dari waktu ke waktu (Bastian, 2010), dan di dekade Reformasi ini, berdampak pada tuntutan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik dari era sebelumnya, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih kapabel lagi.

Akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kadek dalam Wineh, 2019)

Opini yang diberikan oleh BPK RI atas penyajian laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan keuangan. Opini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berisi informasi mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran (Suhardjo, 2019). Laporan keuangan disusun untuk memperoleh gambaran informasi mengenai posisi keuangan seperti posisi harta, utang, dan modal yang terjadi di dalam pemerintah daerah tersebut serta mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai dan stakeholders (Fuad dalam Kapriana, 2020)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 ada empat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan yaitu informasi di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi

keputusan pengguna dengan cara mengevaluasi permasalahan masa lalu dan memprediksi masa depan. Andal yaitu laporan keuangan berisi informasi yang tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja entitas di periode saat ini dengan periode sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan juga harus dapat dipahami yaitu penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan sehingga pengguna laporan dapat memahami informasi di laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang melakukan audit keuangan dan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian BPK RI dinyatakan dengan 4 (empat) opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019. (BPK, 2020). Hal ini di dukung oleh pemerintah daerah yang menindaklanjuti masukan BPK atas koreksi untuk melakukan perbaikan, sehingga laporan keuangan disajikan dan diungkap sesuai dengan SAP.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang baik ada beberapa faktor yang diperlukan yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal yang memadai. Kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan keseluruhan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan atas pengelolaan keuangan APBD. Sistem akuntansi menjadi sangat penting karena dapat membantu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan yang memadai dapat mempermudah pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019), Pravasanti dan Ningsih (2019) dan Wineh dkk., (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian Suhardjo (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih, serta hubungan antara penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum, yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas (Rahmania, 2015), maka Transparansi diperlukan dalam hal ini, di mana asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara Salah satu ciri utama dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah transparansi. Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemanfaatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (Agus dalam Rahmania 2015).

Faktor yang ketiga adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk membantu mempercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Pravasanti dan Ningsih, 2019). Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi agar penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta berkualitas. Penelitian Pebriani (2019), Pravasanti dan Ningsih (2019), dan Wineh dkk., (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fauziyah (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang terakhir adalah Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mengukur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien (Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menyatakan sistem pengendalian internal dapat memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah tetapi tidak dapat memoderasi transparansi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan mendapatkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lagi agar mendapatkan hasil yang konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah, transparansi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yaitu transparansi pengelolaan keuangan, yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian Bakar (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan SIAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Ridhawati (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan Pemerintah Daerah, akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Alasan variabel peran audit internal ditambahkan dalam penelitian karena dengan adanya pemeriksaan secara berkala di lingkup internal pemerintahan maka dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan (fraud) dalam proses pelaporan keuangan. Audit internal juga merupakan indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Jika kinerja pemerintah daerah baik maka kualitas laporan keuangan akan baik dan tidak berpotensi menyesatkan (Hari, 2018).

Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan objek Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Serang, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Alasan perbedaan objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang

berbeda pada pemerintahan, khususnya pada OPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan teori stewardship. Teori stewardship menjelaskan pemerintah sebagai penerima amanah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan untuk organisasi. Pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas diharapkan menjadi motivasi pemerintah untuk menyajikan informasi yang berkualitas bagi organisasi dan pengguna tanpa adanya tujuan untuk kepentingan individu. Tujuan teori stewardship di dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi pengelolaan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

KAJIAN TEORITIK

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok ini yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *Stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan.

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintahan daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Hasil penelitian Wati (2014) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Open Budget Index (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan Internasional Budget Partnership (IBP) dalam menetapkan peringkat indeks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015 (Toni, 2019). Pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (Chalid, 2005).

Hasil Penelitian Indriasih (2014) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam mengelola keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri.

Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Hanafi, 2013: 89). Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka dari pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan

teknologi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil Penelitian (Karmila dkk, 2014) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

Menurut Erlina & Rasdianto (2013), sistem akuntansi keuangan daerah adalah system akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal akan berjalan dengan baik apabila di dukung dengan penerapan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Dengan mengoptimalkan Sistem Pengendalian diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat menjadi mediator dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Arista (2018) menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 10 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran latar

belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen sehingga ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu pemerintah harus melakukan pelatihan seiring dari perkembangan ilmu sehingga transparansi pengelolaan keuangan akan meningkat. Jadi transparansi pengelolaan keuangan yang berkualitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat diperkuat pengendalian internal.

Hasil penelitian Fikri (2016) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi pengaruh Transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Transparansi pengelolaan keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai variabel moderasi.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Trisaputra (2013), Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer, yang cukup untuk melaksanakan tugas,
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja,
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan,
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi,
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi,
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
8. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Melihat penjelasan tersebut bahwa Teknologi informasi dapat menunjang kegiatan organisasi. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan akurasi dari informasi laporan

keuangan. Sebuah sistem Pengendalian intern yang baik akan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik pula. Pengendalian intern juga bertujuan agar organisasi tetap memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi terkait kegiatan organisasi dikarenakan pengendalian intern sudah terintegrasi dengan teknologi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, pemerintah diharuskan melakukan tindak pencegahan terhentinya operasi komputer, melakukan pengendalian atas perangkat lunak sistem berupa pembatasan akses ke perangkat lunak sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan, pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. Tindakan pengendalian tersebut dilakukan agar teknologi informasi digunakan secara optimal. Dengan demikian adanya pemanfaatan teknologi informasi serta diperkuat dengan pengendalian intern maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Pratiwi et al. (2015) menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah secara simultan dan parsial. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

H6 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi empiris yang dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian ini menguji hipotesis dengan variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan dengan variabel moderator Sistem Pengendalian Internal. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai ASN dari Organisasi Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini *Library research*, yaitu mencari dan mengumpulkan data dari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa teori-teori yang berasal dari literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dimana data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku dan tulisan ilmiah lainnya, dengan maksud untuk melengkapi data primer yang ada dilapangan. *Filed research*, yaitu penelitian yang dilakukan dimana datanya diperoleh dengan cara kuesioner, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah model analisis regresi berganda dan analisis MRA (*Moderating Regression Analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik biasa digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan dan untuk memastikan data yang digunakan berdistribusi secara normal serta layak digunakan dalam persamaan model regresi (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik adalah dimana semua datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, distribusi normal dideteksi dengan analisis normal probability plot dan analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Z (1- Sample K-S). Distribusi normal yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya serta jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05.

Asumsi hipotesis pengujian yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Hipotesis Nol (H0) : Data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (H_a) : Data tidak terdistribusi secara normal

Tabel 1. Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,65525529
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,041
	Negative	-0,075
Kolmogorov-Smirnov Z		0,598
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,867

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS 21

Berdasarkan tabel 1 pada uji normalitas data bahwa besarnya nilai signifikansi (*Asymp Sig. 2- tailed*) adalah sebesar 0,867 atau 86,7%, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal karena signifikannya berada di atas 0,05 atau 5% sehingga hipotesisnya menerima Hipotesis Nol (H_0) data terdistribusi secara normal dan menolak Hipotesis Alternatif (H_a) data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Metode pengujian yang bisa digunakan yaitu melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi, membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 (Gozali, 2011). Adapun hasil dari uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Mod el	Collinearity Statistics	
	Toleranc e	VIF
1 Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	0,866	1,154
Kom. Ap. Pemerintah (X2)	0,876	1,142
Pem. Tek. Informasi (X3)	0,968	1,033

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengandung gejala multikolinieritas dan *tolerance* menunjukkan $> 0,10$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel dalam model regresi tersebut.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi pelanggaran terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park. Uji ini dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya. Metode uji Park yaitu dengan

meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\text{Ln}e^2$) dengan variabel independen.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Ho : tidak ada gejala eteroskedastisitas

Ha : ada gejala heteroskedastisitas

Ho diterima bila Signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil perhitungan Heterokedastisitas dengan uji *park* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Mod el	Unstandardi zed Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Bet a		
(Constant)	0,638	4,467		0,143	0,887
1 Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	-0,087	0,103	-0,171	-0,849	0,403
Transp. Pengel. Keu (X2)	-0,010	0,157	-0,013	-0,065	0,948
Pem. Tek. Informasi (X3)	0,106	0,148	0,138	0,716	0,480

a. Dependent Variable: LNRes1

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai sig > α (0,05) semua variabel bersifat homoskedasitas yang dibuktikan dengan nilai signifikansi uji *park*. Semua nilai probabilitas (sig) adalah lebih besar dari 0.05 dengan demikian bahwa dalam model tersebut Ho diterima Ha ditolak sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit Model)

Uji *goodness of fit* merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teroris). Adapun indikator dari goodness of fit dapat dilihat dari koefisien determinasinya (Adjusted R-Square)

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, digunakan uji Koefisien Determinasi (KD). Berikut merupakan hasil perhitungan R^2 untuk mengetahui besarnya pengaruh Maksimalisasi kekayaan, Informasi Akuntansi, hubungan audit internal dengan eksternal, Informasi netral, independensi audit internal terhadap pembuatan keputusan investor individu dengan menggunakan program aplikasi SPSS 21.0.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model

Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,785 ^a	0,616	0,609	2,05199

a. Predictors: (Constant), Pem. Tek. Informasi (X3), Transp. Pengel. Keu (X2), Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,616 variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁), Transparansi pengelolaan keuangan (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama-sama menjelaskan variabilitas dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 61,6% sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui seberapa jauh Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi pengelolaan keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka dilakukan uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Uji F / Analisis Model

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28,540	3	9,513	3,047	

1	Residual	187,31 9	60	3,122		0,035 ^b
	Total	215,85 9	63			

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

b. Predictors: (Constant), Pem. Tek. Informasi (X3), Transp. Pengel. Keu (X2), Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung sebesar 3,047 dan nilai Ftabel pada tarif $\alpha = 5\%$ dan derajat pembilang $m = 3$ dan derajat penyebut digunakan $n-m-1 = 64-3-1 = 60$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,758 atau $3,047 > 2,758$ diterima, artinya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi pengelolaan keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu nilai probability sebesar 0,035 yang berarti angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,03 < 0,05$ menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi pengelolaan keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Untuk melihat apakah variabel sistem pengendalian internal (Z) mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁), Transparansi pengelolaan keuangan (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) digunakan analisis MRA (*Moderating Regression Analysis*)

Tabel 7. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-127,599	63,928		-1,996	0,051

	Sis. Ak. Keu. Daerah (X1)	2,702	1,320	3,488	2,047	0,045
	Transp. Pengel. Keu (X2)	1,208	2,349	1,184	0,514	0,609
1	Pem. Tek. Informasi (X3)	1,969	1,655	1,990	1,190	0,239
	Sis. Peng. Internal (Z)	7,248	2,816	6,689	2,574	0,013
	X1 * Z	-0,122	0,058	-4,797	-2,099	0,040
	X2 * Z	-0,042	0,104	-1,339	-0,409	0,684
	X3 * Z	-0,096	0,075	-2,776	-1,280	0,206

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keu. (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS 21.0

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah positif sebesar 2,047 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,047 > 2,000$) dan $sig < 0,05$ ($0,04 < 0,05$), maka H_a diterima artinya bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 1 diterima).

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan adalah positif sebesar 0,514 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,514 < 2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,61 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 2 ditolak).

Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3 pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah positif sebesar 1,190 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel}

sebesar 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,190 < 2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,24 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 3 ditolak).

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar -2,099 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar -2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,099 > -2,000$) dan $sig < 0,05$ ($0,04 < 0,05$), maka H_a diterima artinya bahwa pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 4 Diterima).

Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar -0,409 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar -2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,197 < -2,000$) dan $sig > 0,05$ ($0,68 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 5 Ditolak).

Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis 5 sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar -1,280 sedangkan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan $df = 64 - 3 = 61$, yaitu t_{tabel} sebesar - 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,280 < -$

2,000) dan $\text{sig} > 0,05$ ($0,21 > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 6 Ditolak).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang diajukan (diterima). Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis kedua yang diajukan (ditolak). Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga yang diajukan (ditolak). Pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis keempat yang diajukan (diterima). Pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis kelima yang diajukan (ditolak). Pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mendukung hipotesis keenam yang diajukan (ditolak).

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Diani, Irma Dian, (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. UNP. Padang.
- Donaldson, L. and Davis, J. (1991) Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Erlina dan Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual*. Medan: Brama Ardian.
- Hanafi, Arsyadi dan Hardo Basuki. (2013). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. dalam *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.

- Indriasih, dan K. Desiana (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014
- Karmila, Roshanti Arina, Edy Sujana dan Kadek Sinarwati. (2014). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal akuntansi*. Vol. 2, No.1.
- Pebriani, D., & Nahartyo, E. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal SNA*. Pontianak.
- Peraturan Pemerintah. No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2007 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pravasanti, Y. A. dan S. Ningsih. 2019. Pengaruh Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo). *STIEE AAS Surakarta*. Volume 2 Nomer, halaman 199-214.
- Rahmania, Darwanis dan Mahyani, Dwi D. (2015). Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* vol 2 No 2 juli 2009 Hal 133-151.
- Ridhawati, Indriasari dan E. Nahartyo. (2014). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI, 23-24 Juli. Pontianak.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.